

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK EKSPANSI PARIWISATA DAN KONFLIK AGRARIA DI BALI

Najwa Lutfi Hanifah, Aris Prio Agus Santoso, Reva Alya Maulidina

S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20 Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
Telp. 0271-7470550
E-mail: najwahanifa40@gmail.com

Abstrak

Pariwisata telah menjadi salah satu strategi utama pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Bali, ekspansi pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan devisa, investasi, dan lapangan kerja. Namun, di sisi lain perkembangan sektor ini memunculkan berbagai tantangan, termasuk konflik agraria, degradasi lingkungan, dan dampak sosial-budaya. Namun ekspansi pariwisata yang signifikan juga membawa dampak negatif seperti konflik agraria dan degradasi lingkungan, yang berdampak langsung pada masyarakat lokal. Penelitian ini fokus pada kasus masyarakat adat Dalem Tamblingan di Buleleng, Bali, yang mengalami tekanan pembangunan pariwisata skala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perluasan pariwisata terhadap pertanian, lingkungan hidup, dan konflik sosial serta untuk menilai efektivitas langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menganalisis data sekunder berupa artikel, laporan, dan pedoman terkait. Studi ini menunjukkan bahwa perluasan pariwisata di Bali menyebabkan alih fungsi lahan adat menjadi kawasan komersial, sehingga berujung pada konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Privatisasi ruang publik, eksploitasi tanah suci, dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat memperburuk kesenjangan sosial dan lingkungan. Komunitas lokal, meskipun menghadapi pembatasan yang membatasi kebebasan bergerak, memainkan peran penting dalam memerangi dampak negatif ini melalui advokasi dan mobilisasi komunitas. Studi ini menyoroti pentingnya penerapan strategi pembangunan pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan yang berfokus pada perencanaan tata ruang yang adil, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan. Tanpa intervensi yang tepat, konflik agraria dan kerusakan lingkungan kemungkinan akan terus meluas, sehingga mengancam keberlanjutan perekonomian pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata Kunci: ekspansi; agraria; strategi

Abstract

Tourism has become one of the main strategies for economic development in developing countries, including Indonesia. In Bali, tourism expansion has contributed significantly to economic growth through increased foreign exchange earnings, investment, and employment. However, on the other hand, the development of this sector has given rise to various challenges, including agrarian conflicts, environmental degradation, and socio-cultural impacts. However, significant tourism expansion also brings negative impacts such as agrarian conflicts and environmental degradation, which have a direct impact on local communities. This study focuses on the case of the Dalem Tamblingan indigenous community in Buleleng, Bali, which is experiencing pressure from large-scale tourism development. The purpose of this study is to analyze the impact of tourism expansion on agriculture, the environment, and social conflict and to assess the effectiveness of government measures to

address these problems. The research method used is a qualitative descriptive approach that analyzes secondary data in the form of articles, reports, and related guidelines. This study shows that tourism expansion in Bali has caused the conversion of customary land into commercial areas, resulting in agrarian conflicts and environmental damage. Privatization of public spaces, exploitation of sacred land, and lack of recognition of indigenous peoples' rights exacerbate social and environmental disparities. Local communities, despite restrictions that limit freedom of movement, play a critical role in combating these negative impacts through advocacy and community mobilization. The study highlights the importance of implementing comprehensive and sustainable tourism development strategies that focus on equitable spatial planning, recognition of indigenous peoples' rights, and environmental protection. Without appropriate interventions, land conflicts and environmental degradation are likely to continue to escalate, threatening the sustainability of the tourism economy and the well-being of local communities.

Keywords: expansion; agrarian; strategy

1. Pendahuluan

Pariwisata adalah salah satu strategi pembangunan ekonomi untuk negara berkembang selama lebih dari setengah abad. Pariwisata menjadi potensi industri untuk menghasilkan pendapatan devisa, menarik investasi internasional, meningkatkan pendapatan pajak, dan menciptakan lapangan kerja baru. Saat ini pariwisata telah berfungsi sebagai mesin pendapatan insentif bagi negara-negara berkembang dalam pertumbuhan ekonomi makro (Torres dan Momsen, 2004). Butler (1991) memberikan definisi yang lebih luas: pariwisata adalah suatu representasi kombinasi dari kegiatan waktu luang (leisure), rekreasi (recreation), perjalanan (travel), dan tamasya (sightseeing). Lebih lanjut, Butler (1991) menyatakan bahwa pariwisata tidak hanya terkait dengan “memanfaatkan waktu luang”, melainkan sebuah fenomena sosial berbasis luas dengan dampak ekonomi, budaya, dan politik, dan jauh melampaui apa yang diterima atau dipahami kebanyakan orang sebagai kegiatan di waktu luang.

di negara berkembang, terlepas dari perannya yaitu ikut menyumbang pendapatan devisa negara (Nwokorie, 2016). Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan kepariwisataan perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menggunakan sumberdaya dan potensi kepariwisataan untuk menjadi kekuatan ekonomi dan non-ekonomi yang dapat diandalkan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang perlu dikembangkan, karena dengan berkembangnya sektor ini dapat diperoleh peningkatan penerimaan devisa negara, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasikan faktor-faktor produksi yang lainnya.

Eksansi industri pariwisata di Bali telah memicu berbagai konflik agraria dan persoalan lingkungan khususnya dikawasan hutan dan lahan pertanian. Konflik-konflik agraria, atau ruang hidup masyarakat dan masalah lingkungan terus terjadi di Bali baik di kawasan hutan maupun lahan pertanian di tengah sejumlah proyek pembangunan fisik terutama atas nama pariwisata. Salah satu kasus masyarakat adat dan negara terjadi di Buleleng. Komang Era Patrisya, perempuan muda Adat Dalem Tamblingan menceritakan perjuangan catur desa menjaga kawasan hutan dan Danau Tamblingan, Bueleleng, Bali. Selama beberapa tahun, warga mengadvokasi kembalinya status tanah adat yang kini masuk dalam Taman Wisata Alam dikelola pemerintah.

Ekspansi dapat diartikan sebagai proses pengembangan industri pariwisata yang mencakup berbagai usaha, layanan, promosi, dan pengembangan yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata. Pembangunan pariwisata yang masif sering kali mengabaikan tata ruang berkelanjutan, sehingga berdampak pada ketimpangan sosial dan privatisasi ruang. Kasus seperti perjuangan masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Buleleng menjadi salah satu potret nyata bagaimana masyarakat lokal berupaya mempertahankan hak atas tanah adat mereka yang terancam oleh eksploitasi pariwisata.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan atas hak masyarakat lokal dan penerapan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta membahas mengenai upaya perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesiapan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menilai efektivitas program, mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap penerapan protokol kesehatan, menganalisis kontribusi program, dan evaluasi sinergi antar lembaga pemerintah.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang menekankan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa, khususnya dalam konteks pariwisata, Penelitian mengenai dampak negatif industri terhadap masyarakat lokal masih terbatas. Konflik pertanian dan kerusakan lingkungan. Penelitian yang lebih spesifik mengenai bagaimana masyarakat adat, misalnya masyarakat adat Dalem Tamblingan di Buleleng, Bali, menghadapi tekanan dari ekspansi industri pariwisata masih minim. Selain itu, meskipun banyak upaya pembangunan pariwisata yang menekankan pentingnya keberlanjutan, penerapan perencanaan tata ruang berkelanjutan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal sering kali diabaikan.

Kebaruan studi ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk memahami konflik agraria dan kesulitan masyarakat adat dalam menghadapi perluasan pariwisata, yang selama ini kurang terwakili dalam studi pariwisata. Studi ini secara khusus berfokus pada kasus masyarakat adat Dalem Tamblingan di Buleleng, Bali, yang berjuang untuk melindungi hak tanah leluhur mereka di bawah tekanan pembangunan pariwisata skala besar.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pengembangan pariwisata dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, mengingat meningkatnya permasalahan lingkungan dan kesenjangan sosial akibat perencanaan tata ruang yang tidak berkelanjutan, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi solusi dan strategi pembangunan pariwisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Mengingat tantangan global terhadap keberlanjutan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, penelitian ini menjadi semakin relevan. Tanpa intervensi yang tepat, konflik agraria dan kerusakan lingkungan kemungkinan akan terus meluas, sehingga mengancam keberlanjutan perekonomian pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini perlu segera dilakukan guna memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mencapai keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dampak ekspansi pariwisata terhadap konflik agraria dan lingkungan hidup di Bali adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memahami kebijakan pemerintah dalam mengatasi ekspansi pariwisata. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilandasi oleh filsafat postpositivisme dan digunakan untuk penelitian saat kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis artikel yang telah diperoleh. Dari analisis yang kami lakukan adapun tantangan dan hambatan dalam melakukan kebijakan ini adalah keterlambatan koordinasi yang kompleks antara berbagai kementerian yang terlibat, penerapan protokol CHSE dilapangan, kendala sumber daya dan anggaran.

3. Hasil dan Pembahasan

Ekspansi pariwisata di Bali telah menyebabkan konversi lahan secara besar-besara, khususnya di wilayah yang merupakan rumah bagi masyarakat adat. Hal ini telah menimbulkan konflik agraria yang signifikan, seperti di kawasan hutan Tamblingan Buleleng, dimana masyarakat adat berjuang untuk melindungi tanah adat yang dianggap sebagai kawasan keramat. Masyarakat lokal berada di bawah tekanan yang sangat besar akibat proyek pembangunan, dimana mereka seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar, polusi, dan privatisasi ruang publik juga berdampak negatif terhadap ekosistem lokal, termasuk berkurangnya sumber air yang menjadi andalan masyarakat Bali.

Sengketa lahan pertanian di Bali tidak lepas dari lemahnya pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup. Banyak tanah adat yang tidak memiliki bukti hukum formal dianggap milik negara dan dapat dialihkan ke perusahaan swasta. Proses ini menunjukkan pola eksploitasi yang mirip dengan praktik kolonial. Selain itu, kebijakan perencanaan tata ruang yang memprioritaskan pengembangan pariwisata seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga memperburuk ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan berkelanjutan. Industri pariwisata Bali mempunyai dampak ganda. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama mengorbankan hak-hak masyarakat lokal. Banyak kebijakan pembangunan yang diambil tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Masalah utamanya meliputi privatisasi ruang publik untuk pariwisata, pembangunan resor di tempat suci, dan izin operasi yang tidak melibatkan masyarakat setempat.

Masyarakat adat dan organisasi lokal di Bali memainkan peran penting dalam memerangi dampak negatif perluasan pariwisata. Mereka melakukan kampanye advokasi, memetakan wilayah adat dan mengadakan demonstrasi damai untuk melindungi hak-hak mereka. Festival hak asasi manusia Bali merupakan salah satu contoh upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu pertanian dan lingkungan. Namun, upaya tersebut kerap menghadapi kendala akibat regulasi yang membatasi ruang lingkup masyarakat sipil, seperti UU cipta kerja, yang memperkuat posisi investor.

Perluasan pariwisata tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap tatanan sosial masyarakat Bali. Kesenjangan upah, kurangnya perlindungan pekerja dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan lokal telah memaksa banyak warga Bali menjadi pekerja dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan lokal telah memaksa banyak warga Bali menjadi pekerja migran. Secara budaya, privatisasi dan pembangunan tempat-tempat suci menciptakan ketegangan karena masyarakat adat kehilangan akses ke tempat-tempat yang penting bagi identitas mereka.

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 mengatakan bahwa “pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global”.

Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu *Bangga Berwisata di Indonesia*, *Bangga Buatan Indonesia*, dan *Indonesia Care/I Do Care* di sektor perhotelan dan pariwisata. Pemerintah juga telah meluncurkan program *Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability* (CHSE) yang merupakan bagian dari program *Indonesia Care/I Do Care*. Program tersebut dirilis demi

mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya. Program *Indonesia Care/I Do Care* dijalankan beriringan dengan program lain yang tentunya diharapkan juga ditindaklanjuti dengan kerja sama antar Kementerian, misalnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata yang berstatus Taman Nasional sampai pembukaan kembali layanan penerbangan internasional dengan pembahasan dan diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak-pihak terkait lainnya.

4. Kesimpulan dan Saran

A. KESIMPULAN

Ekspansi industri pariwisata Bali memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perolehan devisa dan penciptaan lapangan kerja. Namun, perkembangan ini mempunyai dampak negatif khususnya terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Konflik agraria, degradasi lingkungan, dan kesenjangan sosial budaya akibat alih fungsi lahan adat menjadi destinasi wisata merupakan permasalahan utama yang memerlukan perhatian serius. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengembangan pariwisata Bali. Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan seringkali diabaikan dalam pembangunan yang berfokus pada sektor pariwisata. Hal ini pada akhirnya mengarah pada privatisasi ruang publik, hilangnya identitas budaya, dan kerusakan ekosistem lokal.

B. SARAN

1. Kebijakan berdasarkan partisipasi lokal
Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat di semua tahap pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Hal ini mencakup pengakuan formal atas hak adat atas tanah dan perlindungan wilayah yang memiliki nilai spiritual dan ekologis yang tinggi.
2. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
Diperlukan perencanaan tata ruang yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial ekonomi, termasuk membatasi pengembangan cagar alam dan melindungi hutan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat
Untuk memperkuat posisi masyarakat lokal dalam menghadapi perluasan pariwisata, pendidikan tentang hak-hak masyarakat adat dan pentingnya kelestarian lingkungan sangatlah penting dan kampanye perlu diperkuat .
4. Penegakan Peraturan yang Adil
Pemerintah harus mengubah dan menegakkan peraturan yang mendorong investasi berkelanjutan dan memastikan bahwa bisnis pariwisata mematuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku.
5. Memperkuat kerja sama multi-pihak
Menciptakan pembangunan pariwisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Bali memerlukan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

Daftar Pustaka

- Astina Made, & Artani Ketut. (2017). *9-Article Text-20-1-10-20180111*. 7(1).
- Ketut Antara, I., Nanang Darmawan, R., Wayan Sonder, I., Wibby Prasetya, P., Pahlawan Putra, A., & Danendra Putra, N. (2024). Ekspansi Usaha Pariwisata di Kintamani: Analisis Kesenjangan Regulasi dan Risiko Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1).
- Kumala, R., Junaidi, A., Bisnis, S., Kebijakan, D. P., Di..., P., Di, P., Pandemi, M., & Junaidi, D. A. (n.d.). *Prosiding Seminar Stiarni*.
- Oktavia, P., Perdanahardja, G., Doktor, P., Wilayah, P., Sugijanto, K. G., & Labtek, S. (n.d.). *Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Lesser Sunda*.
- Putri, A. T., Arrum, A., & Putri, K. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Pantai Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 54–59. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19983>
- Torres, R., & Momsen, J. H. (2004). Challenges and potential for linking tourism and agriculture to achieve pro-poor tourism objectives. *Progress in Development Studies*, 4(4), 294–318. <https://doi.org/10.1191/1464993404ps092oa>